

IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Dalam Ilmu Akuntansi Keuangan
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang



Oleh :
Grahita Chandrarin

as Merdeka
TAKAAN
18

Disampaikan pada Rapat Terbuka Senat
Universitas Merdeka Malang
Tanggal 8 Desember 2007

REFERENCE

IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Dalam Ilmu Akuntansi Keuangan
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang



Oleh :
Grahita Chandrarin

Disampaikan pada Rapat Terbuka Senat
Universitas Merdeka Malang
Tanggal 8 Desember 2007



Pada Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang
Dalam Ilmu Akuntansi Keuangan
Pada Penelitian Laporan Gaji Pegawai



| | |
|--|----------------|
| PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MERDEKA MALANG | |
| Code Buku | 308 / H / 2008 |
| 657.0218 | 13 - 03 - 2008 |
| CHA | 2 |
| i | Copy: - |

Bismillahirromaannirrohim, Alhamdulillah robbil'aalamiin

Yang terhormat:

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Koordinator Kopertis Wilayah Tujuh Jawa Timur

Ketua, Sekretaris, dan para Anggota Senat Universitas
Merdeka Malang

Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Merdeka Malang

Ketua dan para Anggota Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi
Merdeka Malang

Orang tua, guru, dosen, kolega, handai taulan dan para tamu
undangan yang berbahagia

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala berkat dan karuniaNya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berkah ini, untuk mengikuti Sidang Senat Terbuka Universitas Merdeka Malang. Selanjutnya perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar Ilmu Akuntansi Keuangan pada Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang, yang berjudul:

**IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

Hadirin yang terhormat,

Ada beberapa alasan yang mendasari judul pidato ini. Pertama, saya tertarik pada isu tentang standar akuntansi keuangan karena isu tersebut merupakan isu yang selalu dan dapat dikaji sepanjang masa (isu ini tidak akan pernah *out dated*), baik di kalangan internasional maupun nasional. Khususnya, SAK untuk perusahaan/entitas bisnis yang selalu berkembang cepat dan pesat, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi di tingkat global. Fokus pidato ini adalah pada isu standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan yang diimplementasi untuk perusahaan/entitas bisnis lazim disebut dengan istilah standar akuntansi keuangan (SAK), sedangkan standar akuntansi keuangan yang diimplementasi untuk entitas pemerintah lazim disebut dengan istilah standar akuntansi pemerintahan (SAP). Baik SAK maupun SAP, keduanya merupakan pedoman yang digunakan sebagai dasar penyusunan/penyajian laporan keuangan untuk pihak ekstern. Bedanya, kalau SAK untuk entitas bisnis yang berorientasi laba (*profit oriented companies/entities*), sedangkan SAP untuk entitas pemerintah yang tidak berorientasi pada laba (*nonprofit oriented* atau *public service entities*).

Kedua, saya ingin menunjukkan bahwa perkembangan dan implementasi standar akuntansi keuangan (SAK) di Indonesia lebih awal dibanding standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAK berkembang di Indonesia sejak tahun 1973, sedangkan SAP baru berkembang sejak tahun 2002, sejalan dengan adanya

perubahan/reformasi manajemen keuangan di tubuh pemerintahan Indonesia.

Sekaligus saya bangga, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sudah mempunyai SAP yang merupakan pedoman yang harus diikuti oleh semua entitas pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam menyusun laporan keuangan. Selama ini kegiatan penyusunan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah tidak memiliki acuan baku berupa standar akuntansi. Bahkan jenis laporan pertanggungjawaban yang diwajibkan selama ini terbatas pada laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah.

Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 5 April 2003, sedangkan implementasi Keputusan Menteri No. 337 yang mengatur wewenang BPK untuk mengaudit tiga level pemerintahan (lokal, pusat dan BUMN) dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2003. Menurut pasal 1 UU ini, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (pasal 3).

UU ini menentukan dasar-dasar utama manajemen pengeluaran publik di Indonesia berkenaan dengan: distribusi

kekuatan antara pihak eksekutif dan legislatif serta antar level pemerintahan atas keuangan negara, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing, serta antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelola masyarakat. Juga yang berkenaan dengan keterbatasan aktivitas yang didanai melalui DPR dalam proses anggaran, wewenang untuk pengeluaran yang mendesak dan tak terduga, klasifikasi pengeluaran dan struktur anggaran, peran menteri keuangan dan jajaran menteri dalam manajemen pengeluaran publik, dan akuntabilitas pemerintah terhadap manajemen keuangan negara.

Menurut pasal 8, dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, menteri keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
2. Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN;
3. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
6. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;

8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Ditetapkannya UU Keuangan Negara merupakan tonggak sejarah yang sangat berarti bagi perkembangan akuntansi Pemerintahan di Indonesia, khususnya berkenaan dengan SAP. Tujuan penetapan UU baru ini adalah untuk menyesuaikan kondisi, tata kelola (*governance*) dan sistem pemerintahan berkenaan dengan adanya perubahan regulasi yang terjadi di tubuh pemerintahan. Secara periodik, masing-masing pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari: neraca, laporan arus/aliran kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan, yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas pemerintahan, akan dapat mengangkat indeks *good governance* Indonesia, yang pada tahun 1999 dinyatakan paling rendah di regional Asia (Booz Allen dan Hamilton).

Ketiga, saya terinspirasi untuk fokus pada standar akuntansi keuangan (SAK dan SAP), karena seringnya mendapat pertanyaan baik dari anak didik, kolega dan rekan praktisi, baik mengenai *due process procedure* penyusunan standar maupun segala permasalahan yang berkaitan dengan standar akuntansi keuangan. Melalui naskah pidato ini, saya berharap dapat menginspirasi para pembaca untuk mempelajari dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Berikut ini, untuk mengantar pada kajian tentang permasalahan yang berkembang di praktik dalam rangka implementasi SAK dan SAP, maka saya terlebih dahulu mengkaji tentang perkembangan SAK dan SAP di Indonesia, kerangka konseptual standar akuntansi keuangan dan pemerintahan, *due process procedure* penyusunan standar, secara berurutan berdasar/mengacu pada literatur dan dokumen yang dimiliki oleh IAI dan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Perkembangan SAK dan SAP di Indonesia

Hadirin yang terhormat,

SAK berkembang lebih awal dibanding SAP. Perkembangan SAK di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya panitia penghimpun bahan-bahan dan struktur Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) dan Generally Accepted Accounting Standards (GAAS). Pada tahun 1974 dibentuk komite prinsip akuntansi Indonesia (PAI) yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi keuangan. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1994, komite PAI diubah namanya menjadi dewan standar akuntansi keuangan (DSAK), yang bertugas menyusun dan menerbitkan SAK untuk perusahaan bisnis di Indonesia. Pada saat pertama SAK diterbitkan, hanya ada 35 pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang disusun oleh DSAK. Kemudian di tahun 1999, bertambah menjadi 55 PSAK dan 4 interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK).

DSAK hingga saat ini telah mengembangkan dan menyempurnakan SAK. Hasil revisi tahun 2002 ada dua hal, yaitu: menerbitkan empat PSAK revisi (PSAK No. 55, 31, 5 dan 19) dan tiga PSAK baru (PSAK No. 56, 57 dan 58). Revisi tahun 2004 menerbitkan PSAK No 59 tentang Akuntansi Bank Syariah (beserta KDPPLK Bank Syariah) dan tiga Interpretasi SAK (ISAK No. 05, 06 dan 07). Hasil revisi 2007 adalah menerbitkan lima PSAK revisi (PSAK No. 13, 16, 30, 50 dan 55) dan enam PSAK baru (PSAK No. 101 s/d 106) dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (KDPPLK) Syariah yang telah menggantikan KDPPLK Bank Syariah, serta ada tiga PSAK yang dinyatakan tidak berlaku lagi (PSAK No. 9, 17 dan 20), karena pengaturannya sudah dikaitkan dengan PSAK yang baru.

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Perkembangan SAP di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2002. Perubahan regulasi mendasari perubahan total pada tubuh akuntansi pemerintahan di Indonesia. Perubahan ini dipicu oleh banyak hal, diantaranya: adanya perubahan sistem pemerintahan, dari sistem yang terpusat ke sistem yang demokratis. Perubahan terjadi sejak era reformasi yang berawal pada tahun 1998, masing-masing pemerintah daerah (baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota madya) diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola dan mengatur masing-masing daerahnya, atau yang dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Selaras dengan perubahan tersebut, departemen keuangan dan semua pihak-pihak yang terkait juga melakukan perubahan sistem, sehingga sistem informasi akuntansi pemerintahan juga berubah total. Lingkup perubahan akuntansi pemerintahan bermula dari undang-undang yang mendasari, sampai pada sistem informasi akuntansi dan pertanggung-jawaban, serta proses auditnya.

Undang-undang (UU) yang mengawali perubahan/reformasi manajemen keuangan, akuntansi dan audit pemerintahan ini diantaranya adalah UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut disusun untuk menggantikan regulasi lama warisan pemerintah Belanda, yang sekarang sudah tidak relevan lagi. Regulasi lama tersebut diantaranya adalah: *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) Stbl 1925 No. 448, *Indische Bedrijvenwet* (IBW) Stbl 1927 No.419 Jo. Stbl 1936 No.445, *Reglement voor het Administratief Beheer* (RAB) Stbl. 1933 No.381, and *Instructie en verdure bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer* (IAR) Stbl. 1933 No.320. Sejak dikeluarkan tiga undang-undang baru tersebut di atas, maka undang-undang warisan Belanda sudah tidak diberlakukan lagi.

Sesuai dengan amanat UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut, Presiden menetapkan Keputusan Presiden RI Nomor 84

Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tertanggal 5 Oktober 2004 dan terakhir diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Keppres tersebut menguatkan kedudukan KSAP yang telah dibentuk oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 308/KMK.012/2002 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah tertanggal 13 Juni 2002.

Setelah ketiga undang-undang tersebut ditetapkan, ada dua undang-undang yang terkait dengan UU No. 17/2003. Dua undang-undang tersebut diantaranya adalah UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2004 dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2004. Regulasi pemerintah yang berfungsi sebagai pedoman atau teknik implementasi undang-undang tersebut juga ditetapkan, baik yang berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri, dan jenis peraturan teknis lain.

Untuk menindak lanjuti UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

maka disusun beberapa regulasi pemerintah yang berupa peraturan pemerintah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. PP No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
2. PP No. 21/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Departemen;
3. PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. PP No. 2/2006 tentang Manajemen Utang;
5. PP No. 6/2006 tentang Manajemen Persediaan.

Terbitnya peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 pada tanggal 13 Juni 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, memberikan harapan pada pemerintah, baik pusat dan daerah serta pihak-pihak yang terkait, untuk dapat menyusun laporan keuangan yang lebih baik dari periode sebelumnya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang keuangan negara, SAP disusun oleh Komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP), yang independen dan PP ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Jadi, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain menyusun SAP, KSAP berwenang menerbitkan berbagai publikasi lainnya, antara lain: Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis (Bultek). Sama halnya dengan DSAK, yang disamping menyusun SAK, juga berwenang menyusun Interpretasi PSAK dan Buletin teknis.

Rerangka Konseptual Standar Akuntansi Keuangan dan Pemerintahan

Hadirin yang terhormat,

Rerangka konseptual (*conceptual framework*) merupakan acuan untuk memecahkan masalah akuntansi. Rerangka konseptual menjadi pedoman atau landasan bertindak baik bagi penyedia informasi maupun bagi yang dituju informasi. Financial Accounting Standard Board (FASB) di Amerika menghasilkan rerangka konseptual yang terdiri dari lima (5) konsep, yaitu:

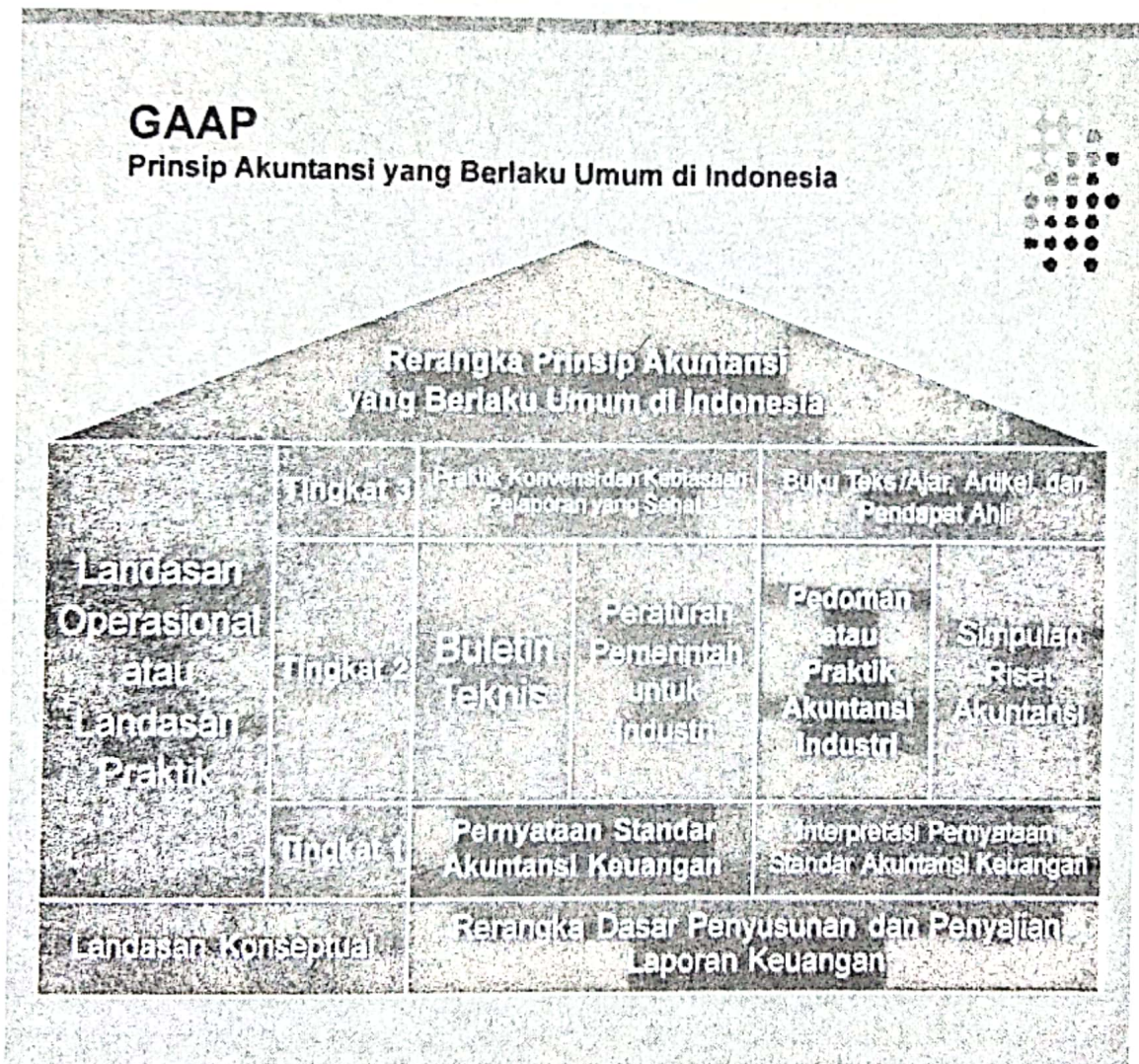
1. Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 1: *Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises.*
2. SFAC No. 2: *Qualitative Characteristics of Accounting Information.*
3. SFAC No. 4: *Objectives of Financial Reporting by Non-business Enterprises.*
4. SFAC No. 5: *Recognition and Measurement in Financial Statements Reporting by Business Enterprises.*
5. SFAC No. 6 (pengganti SFAC No. 3): *Elements of Financial Statements Reporting by Business Enterprises.*

Mengapa rerangka konseptual penting? Menurut Salomons (1986), rerangka konseptual merupakan hal yang diperlukan dalam praktik akuntansi di suatu negara. "A board or committee setting standards without a conceptual framework is like a legislature making laws without a constitution to protect citizen from arbitrary acts of government." Kirk (1981) juga menyatakan bahwa tanpa rerangka konseptual akan sangat sulit bagi penyusun standar untuk mengevaluasi argumentasi bahwa perlakuan akuntansi tertentu lebih baik dalam menggambarkan realitas ekonomi atau untuk menilai bahwa perlakuan akuntansi tertentu lebih efektif daripada perlakuan yang lain untuk mencapai tujuan sosial atau ekonomik tertentu. Tanpa rerangka konseptual akan memungkinkan penyusun standar untuk menggunakan konsep-konsep sekehendak hatinya (ganti penyusun, ganti konsep), sehingga dapat mengakibatkan adanya standar yang tidak konsisten. Tanpa rerangka konseptual, badan penyusun standar dapat diperalat oleh pihak tertentu (*interest group*) untuk menghasilkan standar yang menguntungkan pihak tertentu dan menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai oleh pelaporan keuangan secara keseluruhan. Publik pengguna juga sering meminta perubahan standar, dengan demikian juga dilayani/ditanggapi dalam koridor rerangka konseptual.

Rerangka prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dimuat di SAK merupakan bangunan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ada dua rerangka prinsip

akuntansi yang dikembangkan oleh DSAK, yaitu: (1) rerangka prinsip akuntansi konvensional yang berlaku umum; dan (2) rerangka prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Rerangka prinsip akuntansi konvensional yang berlaku umum diilustrasikan dalam gambar berikut.

Rerangka Prinsip Akuntansi Konvensional yang berlaku Umum



Sumber: IAI (2007)

Landasan konseptual berisi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan (KDPPLK), yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose*). KDPPLK merupakan acuan bagi: (1) penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya; (2) penyusun laporan keuangan jika ada masalah akuntansi yang belum diatur dalam SAK; (3) auditor dalam memberikan opini; dan (4) para pemakai lain dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAK. Struktur KDPPLK di Indonesia meliputi hal berikut.

1. Pendahuluan.
2. Tujuan laporan keuangan.
3. Asumsi dasar.
4. Karakteristik kualitatif laporan keuangan.
5. Unsur laporan keuangan.
6. Pengakuan unsur laporan keuangan.
7. Pengukuran unsur laporan keuangan.
8. Konsep modal dan pemeliharaan modal.

Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah (KDPPLKS) disusun khusus sebagai acuan untuk produk-produk syariah (standar akuntansi keuangan syariah), yang pada prinsipnya mempunyai tujuan hampir sama dengan KDPPLK. KDPPLKS diantaranya membahas transaksi syariah yang berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk

mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual.

Menurut KDPPLKS paragraf 14, syariah merupakan ketentuan hukum islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis. Baik KDPPLK maupun KDPPLKS, keduanya membahas tentang: (1) tujuan laporan keuangan; (2) asumsi dasar; (3) karakteristik kualitatif laporan keuangan; (4) unsur-unsur laporan keuangan; (5) pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan; serta (6) konsep modal dan pemeliharaan modal. Selain KDPPLKS, ada beberapa PSAK syariah yang disusun pada SAK 2007, yaitu PSAK 101 sampai dengan 106, yang secara berurutan mengatur tentang penyajian laporan keuangan syariah serta tentang akuntansi: murabahah, salam, istishna', mudharabah, dan musyarakah.

Untuk perkembangan dan kesempurnaan standar akuntansi keuangan di masa depan, sedang dipikirkan apakah Indonesia membutuhkan kerangka konseptual untuk standar usaha kecil menengah (*small medium enterprises*) atau tidak, mengingat sebagian besar perusahaan di Indonesia termasuk pada kategori

usaha kecil menengah. Langkah awal yang dilakukan oleh DSAK adalah didiskusikannya *A Proposed Blue Print Toward International SME(s) Accounting Standards*, dalam acara konferensi internasional Asean Federation of Accountants (AFA) di Jakarta, pada tanggal 30 Mei 2006. Delegasi negara lain (selain Indonesia) yang terlibat diantaranya: Brunei Darusalam, Cambodia, Lao PDR, Malaysia, Philippines, Thailand, dan CPA Australia.

Rerangka/kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Kerangka konseptual ini bertujuan sebagai acuan bagi beberapa pihak berikut ini (Pemerintah RI, 2005).

1. Penyusun standar (KSAP) dalam melaksanakan tugasnya.
2. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar.
3. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
4. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, diantaranya membahas tentang: (1) tujuan kerangka konseptual; (2) lingkungan akuntansi pemerintah; (3) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna/pemakai; (4) entitas pelaporan;

(5) peranan dan tujuan pelaporan keuangan serta dasar hukum; (6) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan (7) definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

***Due Process Procedure* Penyusunan Standar Akuntansi di Indonesia**

Hadirin yang berbahagia,

Untuk penyusunan SAK baru, ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi secara keseluruhan, diantaranya adalah:

1. Terdapat transaksi unik yang belum diatur dalam PSAK yang ada.
2. Entitas yang membutuhkan lebih dari satu (banyak).
3. *Going concern* entitas yang membutuhkan tidak terbatas.

Jika salah satu syarat tersebut ada yang tidak dipenuhi, maka produk yang dapat dihasilkan berupa Pedoman Akuntansi, dengan kata lain DSAK tidak dapat menghasilkan produk PSAK baru.

Secara garis besar, *due process procedure* penyusunan SAK meliputi langkah-langkah sebagai berikut.

1. Identifikasi isu untuk dikembangkan menjadi PSAK.
2. Konsultasikan isu dengan dewan konsutatif SAK
3. Membentuk tim kecil dalam DSAK.
4. Melakukan riset terbatas.



5. Melakukan penulisan awal *draft*.
6. Pembahasan dalam DSAK.
7. Peluncuran *draft* sebagai *exposure draft* dan pengedarannya.
8. *Public hearing*.
9. Pembahasan tanggapan atas ED dan masukan *public hearing*.
10. Persetujuan ED PSAK menjadi PSAK.
11. *Final checking*.
12. Sosialisasi standar.

Identifikasi isu pada tahap awal *due process procedure* ini, sangat dipengaruhi oleh perkembangan di lingkungan ekonomi dan bisnis. Isu dapat dikembangkan atas dasar usulan anggota, atau kerjasama institusional/asosiasi. Sebagian besar *exposure draft* yang disusun merupakan adopsi dan adaptasi dari IAS/IFRS. *Public hearing* merupakan tahapan yang wajib dilalui, untuk menerima/meminta input atau tanggapan dari *stakeholder* sebagai pemakai laporan keuangan. Kemudian untuk tahap persetujuan ED akan disahkan oleh anggota dewan, setelah kuorum terpenuhi (*simple majority*).

Sama halnya dengan SAK, *due process procedure* penyusunan SAP, juga meliputi beberapa tahapan, yaitu: tahap penyiapan, penetapan dan sosialisai SAP. Pada tahap proses penyiapan SAP meliputi beberapa langkah berikut.

1. Identifikasi isu/topik untuk dikembangkan menjadi standar.
2. Pembentukan kelompok kerja (Pokja) di dalam KSAP.

3. Riset terbatas oleh kelompok kerja.
4. Penulisan draf SAP oleh kelompok kerja.
5. Pembahasan draf oleh komite kerja.
6. Pengambilan keputusan draf untuk dipublikasikan.
7. Peluncuran draf publikasian SAP (*Exposure Draft*).
8. Dengar pendapat terbatas (*limited hearing*) dan dengar pendapat publik (*public hearing*).
9. Pembahasan tahapan dan masukan draf publikasian.
10. Finalisasi draf dalam rangka ditetapkan menjadi SAP.

Langkah pertama merupakan proses pengidentifikasian topik-topik akuntansi dan pelaporan yang berkembang dan memerlukan pengaturan dalam bentuk pernyataan SAP. Kemudian kelompok kerja yang kompeten di bidangnya, melakukan riset terbatas terhadap literatur, standar yang berlaku di negara lain, praktik akuntansi yang berlaku di berbagai negara, praktik akuntansi yang sehat (*best practices*), peraturan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Setelah draf dinyatakan dapat dipublikasi, draf tersebut dikirimkan pada stakeholder yang antara lain meliputi: masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa dan instansi yang terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan. Dengar pendapat dilakukan dua kali, pertama dengar pendapat terbatas dengan kalangan akademisi, praktisi dan para pemerhati akuntansi pemerintahan, dan kedua dilakukan dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap SAP. Finalisasi draf dalam rangka menjadi SAP yang ditetapkan dilakukan setelah ada pembahasan tanggapan dan masukan atas draf yang disusun.

Finalisasi tersebut merupakan tahap penyempurnaan draf baik secara substansi, konsistensi, koherensi maupun bahasa, yang ditandai dengan penandatanganan draf PSAP oleh seluruh anggota KSAP.

Tahap penetapan SAP menjadi peraturan pemerintah (PP) dilakukan setelah KSAP melalui pemerintah, meminta pertimbangan BPK RI atas draf SAP, yang selanjutnya komite konsultatif mengusulkan draf final SAP kepada presiden melalui menteri keuangan untuk ditetapkan menjadi PP. Setelah ditetapkan dengan PP, SAP dipublikasi dan didistribusi kepada publik termasuk masyarakat, institusi, serta perwakilan organisasi. Kemudian KSAP melakukan sosialisasi standar baru kepada para pemakai laporan keuangan (*stakeholder*).

Demikian, baik SAK dan SAP, keduanya disusun melalui *due process procedure* yang pada prinsipnya hampir sama. *Due process procedure* seperti ini juga lazim dilakukan di negara-negara lain dalam proses penyusunan standar akuntansi keuangan, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Untuk standar akuntansi keuangan usaha kecil menengah (UKM) di Indonesia, telah dibentuk tim kerja yang diketuai oleh salah satu anggota DSAK¹, yang telah menyusun dan menyajikan "*Toward International SME(s) Accounting Standards*" dalam forum AFA Roundtable Discussion on SME(s) di Jakarta sebagaimana tersebut di atas.

¹ Jan Hoesada ketua Pokja SAK UKM

Sebagai kelanjutan dari hal tersebut, telah dilakukan terobosan untuk mengurangi panjangnya waktu, dengan strategi atau *due process procedure* sebagai berikut².

1. Terjemahan draft IFRS-SME Accounting Standards dilakukan oleh tim khusus diluar DSAK.
2. Seminar IFRS-SME Accounting Standards, dan rencana pembangunan Draft Standar UKM bagi Indonesia (*pre-drafting hearing*) dengan menguraikan berbagai hal yang harus disederhanakan bagi RI³.
3. Menyusun Draft Standar UKM berdasar butir 1 dan 2 di atas, yang rencananya akan diajukan kepada DSAK pertengahan Desember 2007.
4. DSAK diharapkan dapat mulai menyusun Draft Publikasian bulan Januari 2008, *public hearing* dapat dilakukan pada bulan Maret 2008, sehingga Standar UKM diharapkan akan selesai sebelum Juni 2008, karena sekitar 44 juta UKM di Indonesia sudah lama menanti.
5. Direncanakan pada bulan Juni 2008 mendatang ada International Conference untuk Standar UKM dan Syariah di Indonesia, sehingga diharapkan/ditargetkan pada tahun 2008 RI menjadi mercusuar dunia dalam Standar UKM dan Syariah.

² Atas dasar wawancara dengan Ketua Pokja SAK UKM: Jan Hoesada.

³ Seminar nasional telah dilakukan pada akhir Oktober 2007.

Impian Standar UKM menjadi terbaik di dunia, *down to earth*, sangat tepat karena disusun sesuai dengan kebutuhan, diharapkan akan segera terlaksana dan menjadi kenyataan.

Implementasi SAK di Indonesia

Hadirin yang berbahagia

Pada kenyataannya di praktik, implementasi SAK tidaklah mudah, walaupun pada proses penyusunan SAK baru sudah melewati berbagai tahap sebagaimana diungkapkan dalam *due process procedure* tersebut di atas. Pada saat *public hearing* dilakukan, para praktisi atau pemakai laporan keuangan tidak banyak yang berfikir untuk mengestimasi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul jika PSAK baru akan diimplementasi nanti. Banyak permasalahan yang muncul justru pada saat PSAK sudah diimplementasi di praktik, hal ini juga sangat menyulitkan dan menyibukkan penyusun standar.

Sejauh ini sebagian besar pernyataan SAK diadopsi dari pernyataan International Accounting Standards IAS/IFRS yang disusun oleh International Accounting Standard Board (IASB)⁴. Terlalu cepatnya ISAB melakukan revisi terhadap IAS/IFRS, terkadang juga merupakan permasalahan yang berarti bagi DSAK dalam melakukan adopsi atas standar yang baru direvisi tersebut. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan adopsi tersebut, karena adanya bahasa yang berbeda dan harus

⁴ IAS pada tahun 2004 diubah namanya menjadi International Financial Reporting Standards (IFRS).

ada penyesuaian implementasinya. DSAK harus dengan cepat menterjemahkan standar revisi (dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia), dan melakukan proses penyusunan sampai pada tahap publikasi standar baru.

Untuk memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan oleh IFAC, hampir semua negara yang menjadi anggota International Federation of Accountants (IFAC) berupaya untuk konvergen terhadap IAS/IFRS, tidak terkecuali Indonesia. Pada prinsipnya tingkatan adopsi ada lima: (1) *full adoption*; (2) *adapted*; (3) *Piecemeal*; (4) *Referenced*; dan (5) *Not adoption et al.* Masing-masing negara dapat melakukan adopsi dan menentukan tingkatan mana yang sesuai dengan kondisi negaranya. Misalnya, dewan standar Singapura (Council on Corporate Disclosure and Governance), telah mengadopsi seluruh standar produk IFRS dan menterjemahkan *word by word (full adoption)*, kecuali IAS 40. Accounting Standards Board of Japan (ASBJ) pada bulan Januari 2005 telah membuat proyek bersama IASB dalam upaya konvergensi juga.

Komitmen Indonesia untuk konvergen terhadap IFRS berkembang setelah isu harmonisasi. Walau sampai sekarang belum ada ketentuan yang pasti tentang kapan hal itu akan berlaku efektif dan pada tingkatan adopsi yang mana yang sesuai untuk implementasi di Indonesia, namun Indonesia sudah mencanangkan untuk turut serta konvergen terhadap IFRS. Semuanya harus difikirkan dan dipertimbangkan betul keuntungan dan kerugiannya jika kita akan ikut konvergen.

Ada beberapa keuntungan jika Indonesia sudah konvergen dengan IFRS, pertama, memenuhi kewajiban yang telah dipersyaratkan oleh IFAC, sebagai organisasi akuntan di tingkat dunia. Cepat atau lambat Indonesia harus konvergen terhadap IFRS, sebagai konsekuensi masuknya Indonesia dalam organisasi akuntan tingkat dunia.

Kedua, biaya (*cost*) untuk perusahaan multinasional yang tercatat di beberapa negara (misalnya ada perusahaan tertentu yang tercatat di London Stock Exchange dan New York Stock Exchange) akan lebih rendah, karena dengan mengacu pada satu standar internasional, maka dapat diakui di semua pasar modal di tingkat internasional. Sejauh ini jika perusahaan tersebut, yang tercatat di pasar modal Indonesia maka harus mengikuti SAK Indonesia, tercatat di LSE harus mengikuti IFRS, sedangkan tercatat di NYSE juga harus mengikuti US GAAP. Jadi ada ketidak efisienan yang cukup signifikan bagi entitas yang tercatat di beberapa negara, karena harus tunduk pada standar masing-masing negara. Jika seluruh dunia akan konvergen, maka hanya ada satu standar yang dapat diikuti oleh semua negara, hal ini akan lebih efisien.

Disamping menyusun standar, DSAK juga memperhatikan kepentingan pemakai, yang terkadang juga meminta perubahan standar, hal itu tetap dilayani sepanjang masih dalam koridor rerangka konseptual. Sungguh suatu pengalaman yang sangat mendebarkan dan tak terlupakan bagi saya ketika pada tahun 2006 DSAK diuji independensinya.

⁵ Ketika ada salah satu perusahaan *go public* yang menjual efeknya di luar negeri, berusaha untuk menekan DSAK (melalui DPN) dan Bapepam agar mengubah salah satu standarnya, karena implementasi standar tersebut telah mengakibatkan kerugian besar pada perusahaannya. Namun demikian, setelah mengalami proses yang panjang dan sangat menegangkan, akhirnya ditemukan solusi yang tepat bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengatasi masalahnya, profesi akuntan selamat, pasar modal dan Bapepam selamat, dengan demikian selamatlah Indonesia. DSAK memang dituntut untuk tetap independen baik terhadap pemerintah, praktisi swasta maupun pasar modal, karena DSAK harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat umum.

DSAK berupaya untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam rangka konvergensi pada IAS/IFRS, yang meliputi faktor proses konvergensi internal dan eksternal. Adapun faktor proses konvergensi internal sebagaimana berikut.

1. Pola konvergensi meliputi: harmonisasi (*harmonization*), adaptasi (*adaptation*), adopsi selektif (*selective adoption*), dan adopsi penuh (*full adoption*).
2. Kompleksitas dan struktur standar internasional.

⁵ Pada acara tersebut ketua dan semua anggota DSAK benar-benar diuji independensinya, namun untunglah permasalahan segera dapat dicarikan jalan keluarnya, sehingga standar yang telah diimplementasi tidak jadi dicabut dan DSAK tetap independen. Pada saat itu, salah satu anggota DSAK, Jan Hoesada, menulis "Accounting Avalanche 2006," yang menjadi dokumen DSAK (tidak dipublikasi).

3. Kesulitan untuk menterjemahkan dari IAS/IFRS bahasa Inggris ke Indonesia.

4. Revisi oleh IASB terlalu cepat, sementara DSAK masih mengadopsi beberapa IAS/IFRS.

Faktor proses konvergensi eksternal meliputi beberapa hal berikut.

1. Inkorporasi (*incorporation*) dalam regulasi atau hukum nasional.

2. Struktur dan supra struktur nasional berbeda dari negara berkembang.

3. Kemampuan untuk menyusun standar untuk realita bisnis.

4. Sebagian besar perusahaan di Indonesia tidak tercatat di pasar modal, namun berupa perusahaan kecil menengah, dan sebagian besar orang menjalankan bisnisnya dalam ekonomi informal.

Permasalahan lain yang muncul dan harus dipertimbangkan berkenaan dengan konvergensi ini adalah jumlah perusahaan multinasional di Indonesia yang tercatat di beberapa negara tidak banyak. Jadi konvergensi ini dapat diasumsikan hanya menguntungkan beberapa entitas yang berskala internasional saja. Justru yang banyak di Indonesia adalah perusahaan kecil dan menengah (*SMEs*), yang sekarang standarnya sedang dalam proses penyusunan untuk segera dapat diberlakukan. Di sisi lain misalnya tentang proses pendidikan akuntansi di Indonesia, yang selama ini masih banyak menggunakan text book berbasis US GAAP untuk proses pembelajaran, dan memahami standar Amerika (*SFAS*) dirasa

memang lebih mudah dibanding IFRS, karena argumentasi yang mendasari standar baru telah diungkapkan dengan jelas.

Karakteristik kualitatif pelaporan keuangan ditentukan oleh reliabilitas (*reliability*) dan relevansi (*relevancy*) laporan keuangan. Untuk meningkatkan relevansi laporan keuangan, maka digunakan konsep pengukuran berbasis nilai wajar (*fair value*). Keuntungannya jelas, laporan keuangan menjadi lebih bermakna dan mempunyai relevansi tinggi terhadap pengambilan keputusan ekonomi. Namun demikian, konsep ini juga mengundang banyak permasalahan ketika beberapa standar baru yang berbasis nilai wajar diimplementasi di Indonesia. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika standar baru yang dikeluarkan melibatkan profesi lain selain akuntan, misalnya PSAK No. 24 tentang imbalan kerja harus melibatkan profesi aktuaris, dan PSAK No. 16 tentang aset tetap yang harus melibatkan profesi penilai (*appraisal*) dalam menentukan nilai wajar aset tetap.

Sejalan dengan perkembangan penyusunan SAK baru (revisi), maka permasalahan selalu muncul ketika standar diimplementasi di Indonesia. Walau demikian, segala permasalahan segera diupayakan solusinya, baik oleh DSAK, pemerintah maupun pihak lain yang terkait dengan implementasi SAK. Walaupun SAK yang sudah lebih dari sepuluh tahun diimplementasi di Indonesia, namun masih mempunyai banyak permasalahan. Demikian juga SAP yang baru saja dalam tahap permulaan implementasi, juga mengundang banyak permasalahan sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Implementasi SAP di Indonesia

Hadirin yang berbahagia

Implementasi SAP dirasa lebih berat/sulit dibanding SAK, mengingat terbatasnya jumlah akuntan yang bekerja di entitas pemerintahan. Khususnya untuk entitas pemerintah daerah (kabupaten/kota) yang berlokasi jauh dari pusat informasi. Hal ini dapat dijadikan indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan implementasi SAP di Indonesia, karena peran akuntan di daerah sangat besar untuk menunjang perkembangan implementasi. Sejauh ini akuntan lebih banyak bekerja di kota besar yang dekat dengan pusat informasi. Berbagai bentuk program dikemas dalam rangka untuk mempelajari dan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi keuangan pemerintahan.

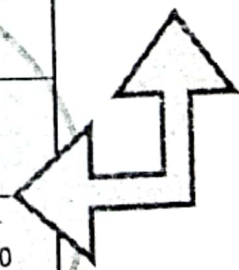
Inspektorat Jenderal (Itjen) Depdiknas merupakan salah satu pelaksana dari STAR Project (*State Audit Reform- Sector Development Program*) yang didanai oleh ADB (Asian Development Bank) Loan No. 2127-INO (SF), yang mulai operasional sejak tahun anggaran 2006. Proyek tersebut bertujuan untuk mendanai (memberi beasiswa) baik di tingkat strata satu maupun magister, agar tersedia sumberdaya manusia yang kompeten di bidang keuangan, akuntansi dan pemeriksaan. Pelaksana (*Project Implementation Unit/PIU*) STAR Project selain Itjen Depdiknas adalah Bappenas, Itjen Depdagri, Itjen Depkeu, BPK, BPKP, Sekretariat DPR, dan Bawasda.

Pelaksana (*Project Implementation Unit/PIU*) STAR Project selain Itjen Depdiknas adalah Bappenas, Itjen Depdagri, Itjen Depkeu, BPK, BPKP, Sekretariat DPR, dan Bawasda. Pada proyek ini, Itjen Depdiknas bertugas mengembangkan aparat pengawasan seluruh Itjen departemen (20 Itjen) dan bawasda (50 Bawas provinsi/kabupaten/kota) melalui peningkatan pendidikan formal jenjang S1 dan S2 bidang akuntansi pemerintahan/pengawasan keuangan negara. Tabel berikut ini menunjukkan hasil survey tahun 2004 terhadap 300 Bawasda, yang menjadi alasan proyek ADB mendanai beasiswa tersebut di atas.

Human Resources Constraints of Bawasda

| Description | Number on "average" for each of Bawasda Province | Number on "average" for each of Bawasda Kabupaten/Kota |
|---|--|---|
| Total number of permanent staff, both for auditors and administrative | 98 staff in each Bawasda Highest in Jakarta: 235 Lowest in Gorontalo: 34 | 32 Staff in each Bawasda Highest in Kota Bogor: 102 Lowest in Pariaman: 2 |
| % Of female as permanent | 26% of staff are female | 26% of staff are female |
| Number of staff as auditors/supervisors | 43 staff in each Bawasda (43% of total staff) | 16 staff in each Bawasda (50% of total staff) |
| % Of female as auditors | 19% of total auditors | 18% of total auditors |
| Number of staff having supervisory / auditors certification | 16 staff (or 37% from auditors staff or 16% from total staff) | 6 staff (or 38% from total auditors staff or 19% from total staff) |
| Number of staff graduated Diploma (D1) and higher in all fields | 37 staff in each Bawasda (58% from total staff) | 22 staff in each Bawasda (69% from total staff) |
| Number of staff graduated Sarjana (S1) in all fields | 45 staff in each Bawasda (46% from total staff) | 17 staff in each Bawasda (53% from total staff) |
| Number of staff graduated Master (S2) in all fields | 4 staff in each Bawasda. Highest in Jakarta: 27 staff Non has Phd degree | 4 staff in each Bawasda Non has Phd degree |
| Number of staff graduated from Accounting degree (diploma 1 and higher) | 7 staff in each Bawasda (7% of total staff or 16% of total auditor staff) | 2 staff in each Bawasda (6% of total staff or 12.5% of total auditor staff) |
| Number of graduated from Sarjana (S1) in Accounting | 5 staff in each Bawasda | 1 staff in each Bawasda |
| % of staff graduated from Master (S2) in Accounting | 0.2% total staff (or only 2 In every 1.000 staff have master (S2) in accounting) | 0.6% of total staff or only 6 in every 1.000 staff have master (S2) in accounting) Non has Phd degree |
| Additional new staff accountants needed for the near future | 5 additional accountants staff are needed in average | 2 additional accountants staff are needed in average |

Alasan ADB Fokus Beasiswa S1 / S2 Akuntansi/Audit Pemerintahan



Sumber: Itjen Depdiknas, STAR-SDP, ADB (2007)

Selain masalah sumber daya manusia yang harus dipersiapkan dalam rangka implementasi SAP di Indonesia, masalah lain yang juga krusial adalah masalah basis akuntansi dalam penyajian laporan keuangan. Basis kas adalah pengakuan pengaruh transaksi pada saat kas diterima atau dibayarkan, sedangkan basis akrual adalah pengakuan pengaruh transaksi pada terjadinya transaksi, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Pada basis akrual ini, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus/aliran sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Basis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah, karena dalam rangka untuk pengukuran kinerja, informasi basis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Basis akrual dapat menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi dan informasi operasi/kegiatan. Di dalam akuntansi pemerintahan, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam bentuk laporan operasional atau laporan aktivitas atau laporan surplus/defisit. Standar akuntansi pemerintahan yang disusun oleh International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) menganut basis akrual.

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Aliran Kas dan

Menurut IPSAS, laporan keuangan terdiri dari:

1. Neraca (*Statement of Financial Position*);
2. Laporan Kinerja Keuangan (*Statement of Financial Performance*);
3. Laporan Perubahan dalam Aset bersih/Ekuitas (*Statement of Changes in net Assets/Equity*);
4. Laporan Aliran Kas (*Cash Flow Statement*); dan
5. Catatan atas Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan (*Accounting Policies and Notes to the Financial Statements*).

SAP menganut basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*), yang mengakui asset, kewajiban, dan ekuitas dana dengan basis akrual, sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan basis kas. Pada dasarnya, akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual tidak banyak berbeda dengan akuntansi berbasis akrual. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan PP No. 24/2005 tentang SAP. Keberadaan pos piutang, aset tetap, hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual, meskipun hampir sepenuhnya merupakan suatu diskresionari.

Laporan keuangan menurut SAP terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. Laporan Aliran Kas; dan

4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasar pada informasi tersebut di atas, maka tampak dengan jelas perbedaan antara IPSAS yang berbasis akrual dan SAP yang berbasis kas menuju akrual adalah pada laporan kinerja keuangan. Pada tahap awal implementasi SAP, basis kas menuju akrual merupakan langkah yang tepat untuk sementara waktu. Untuk perkembangan berikutnya, jika kondisi sudah memungkinkan maka dapat diimplementasi SAP yang berbasis akrual. Melalui strategi implementasi yang direncanakan dengan baik, komitmen, tujuan yang jelas, sumber daya manusia yang andal, dan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan, maka diharapkan SAP yang berbasis akrual dapat diimplementasikan dengan baik di masa mendatang. Tentulah perlu waktu yang panjang untuk mewujudkan semua ini, karena implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual tidak mudah, karena di bawah basis ini semua aktiva negara harus direvaluasi.

Permasalahan yang timbul akibat implementasi standar baru (baik SAK maupun SAP) tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun terjadi juga di negara lain, baik di tingkat negara berkembang maupun negara maju. Banyak permasalahan atau kendala yang berkembang di praktik, walaupun juga ada banyak sisi keuntungannya. Oleh karena itu, IAI sebagai organisasi profesi akuntan, senantiasa mendorong anggotanya untuk memahami, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesionalnya secara berkesinambungan.

Divisi pendidikan IAI, baik di pusat, tingkat kompartemen maupun wilayah, telah memfasilitasi para praktisi untuk mampu memahami dan mengimplementasi standar melalui Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL), seminar dan berbagai jenis pendidikan/pelatihan. Peran organisasi profesi harus diyakini menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan perekonomian nasional yang efisien. Implementasi SAK dan SAP dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada di praktik diharapkan dapat memperbaiki perekonomian Indonesia secara fundamental.

Ungkapan Syukur, Apresiasi dan Terima Kasih

Hadirin yang mulia

Pada akhir pidato ini, perkenankanlah saya untuk bersyukur dan menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam mencapai puncak karier akademik ini.

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, berkah dan kekuatan dalam menghadapi semua ujian dan menjalankan amanahNya. Kepada mama dan ayah saya yang tercinta: Hj. Ambatien dan Drs. H. M. Furkamsidik, yang alhamdulillah pada kesempatan ini dapat mendampingi saya disini, ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan atas cinta, kasih sayang, dan doa restu beliau. Beliaulah orang pertama yang telah mendidik saya dengan keimanan, kejujuran dan kedisiplinan. Doa ayah dan mama

telah mengantarkan saya sehingga saya berhasil menjadi guru besar di bidang akuntansi keuangan. Semoga pengukuhan ini merupakan salah satu wujud bakti saya kepada orang tua, yang telah memberi nama Grahita Chandrarin (yang menurut beliau berarti putri bulan yang penuh dengan ilmu pengetahuan). Semua orang tua pastinya punya kebanggaan dan harapan mulia kepada anaknya, untuk itu saya sangat berapresiasi setinggi-tingginya kepada beliau berdua yang telah mendidik saya dan anak-anak saya dengan penuh kasih sayang, dan tulus ikhlas. Sekali lagi terima kasih mama, terima kasih ayah.

Terima kasih saya ucapkan kepada yth. bpk. Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA., Ak. (Menteri Pendidikan Nasional RI), yang telah mengangkat saya menjadi guru besar ilmu akuntansi keuangan, per 1 April 2007. Metoda dan cara beliau mengajar Metodologi Penelitian (di Program Magister) dan Riset Akuntansi Perilaku (di Program Doktor), telah menginspirasi saya untuk terus mempelajari dan memahami filosofi dan metoda riset di bidang akuntansi. Beliau telah menanamkan pada kami tentang nilai-nilai luhur peneliti. Kepada koordinator kopertis wilayah tujuh, Jawa Timur, saya juga mengucapkan terima kasih.

Kepada yth. Rektor/Ketua Senat Universitas Merdeka Malang: Ibu Dr. Kridawati Sadhana, MS., beserta sekretaris dan para anggota Senat UNMER Malang, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kemudahan yang diberikan kepada saya untuk mencapai jabatan guru besar ini.

Kepada yth. bpk. Drs. Tugino Sokarno (Ketua Yayasan Perti UNMER Malang); bpk. Dr. Agus Suprpto MSc. (Wakil Rektor I); bpk. Husien Muslimin, SH, MHum. (Wakil Rektor II); serta bpk. Prof. Dr. Agus Sholahudin MS. (Wakil Rektor III), saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya.

Terima kasih kepada Bpk. Drs. Maxion Sumtaki, MS, Dekan FE UNMER Malang dan para Pembantu Dekan, serta kolega saya di Fakultas Ekonomi (khususnya di jurusan akuntansi) yang dengan sengaja tidak saya sebutkan namanya, karena saya tidak ingin ada satupun nama yang tertinggal. Terima kasih pada direktur saya di Program Pascasarjana: bpk. Dr. Aloysius R. Entah, SH. serta kolega saya: ibu Dr. Dewi Asttuty SH., MHum., ibu Prof. Dr. Widji Astuti MM., bpk. Dr. Nazief Nirwanto MS, bpk. Dr. I Made Weni MSi., bpk. Dr. Tanto Gatot MS., bpk. Dr. Edi Subiyantoro, bpk. Drs. Tommy MS dan bpk. Ali Imron SH., MS, serta semua staf dan karyawan di Program Pascasarjana.

Kepada yth. bpk Dr.(HC) dr. Wahjoetomo, SpPD (Rektor periode 1987-1995); bpk Drs. Soewarso (Pembantu Rektor I periode 1987-1999); bpk Dr. Budi Siswanto MSi. (Rektor periode 2003-2007 dan Pembantu Rektor II periode 1999-2003); bpk dr. Sumadi Sp.B (Ketua Yayasan Perti UNMER Malang); serta bpk Drs. Soewoto, MM (Dekan FE periode 1993-1999 & Pembantu rektor I periode 1999-2003), saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan beliau yang telah mengirim dan memfasilitasi saya untuk studi lanjut di Program Magister dan Doktor UGM.

atas perkenan dan dukungan beliau saya dapat mengikuti International Doctorate Program di University of Kentucky, Lexington dan melakukan riset di Amerika, sebagai bagian dari studi saya di Program Doktor UGM. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada yth. bpk dr. Rusman SpKJ (Rektor periode 1995-2003); bpk. Prof. Dr. Anwar Sanusi, MS (Pembantu Rektor I: 2003-2007 dan Dekan FE: 1999-2003); bapak Ir. Albiyadi (Ketua Yayasan Perti Malang: 1999-2007); serta bpk. Gaspar Ganggas, SH. MS. (Pembantu Rektor III: 1999-2007), yang telah mendukung saya untuk berkarier di UNMER Malang.

Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada promotor dan ko-promotor saya, yth.: Bpk. Prof. Dr. Zaki Baridwan, M.Sc., Ak. (Presiden Komisaris BNI) beserta ibu dan Bpk. Prof. Dr. Mas'ud Machfoedz, M.Sc., Ak. (Komisaris BTN dan PT. Angkasa Pura) beserta ibu. Beliau adalah *excellent teachers* yang mampu menginspirasi saya untuk terus belajar, mencari dan mengamalkan ilmu. Jasa-jasa beliau dan keluarga beliau sungguh tak terlupakan, bagi saya dan keluarga saya, yang tanpa pamrih, selalu memotivasi dan membantu saya ketika saya studi di UGM dan sampai sekarang. Rekomendasi beliau mengantarkan saya untuk dapat diterima sebagai Anggota DSAK di IAI Pusat-Jakarta, sebagai awal karier saya di bidang akademik dan profesi di tingkat nasional. *To my mentor: dean Prof. Dr. Michael G. Tearney (and his family: Mrs. Barbara, Bryce and Flint), from the Gatton College of Business and Economics, University of Kentucky, I would like to present my deepest thanks and*

sincere appreciation to you. Beberapa tahun yang lalu ketika beliau berkunjung ke Indonesia, beliau telah menyempatkan waktunya untuk memberikan seminar di Universitas Merdeka yang tercinta ini.

Terima kasih juga saya ucapkan pada ko-promotor saya bpk. Prof. Dr. Jogiyanto Hartono M., MBA., Ak. (Direktur Program Doktor Akuntansi UGM: 2002 - 2007), yang dengan hati mulia merekomendasi saya untuk menjadi penguji dan tim penilai disertasi di Sekolah Pascasarjana UGM serta keikhlasannya untuk mengajak saya duduk bersama memberi kuliah umum/kolokium/seminar/reviewer/simposium, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sungguh pengalaman dan kesempatan yang berarti bagi saya, untuk duduk bersama menilai dan menguji disertasi di Program Doktor UGM, serta menjadi pembicara/moderator/reviewer. Terima kasih juga pada Tim Penilai Disertasi saya: bpk. Dr. Suwardjono MSc., Ak. dan bpk. Prof. Dr. Indra Wijaya Kusuma, MBA., Ak., serta Prof. Dr. Djoko Susanto, MSA., Ak. yang telah meluangkan waktunya untuk mengoreksi dan memberi masukan berarti dalam disertasi saya. Terima kasih juga kepada bpk. Prof. Dr. Slamet Sugiri, M.Sc., Ak. yang telah membantu menyempurnakan dan memberikan koreksi naskah ringkasan disertasi saya dalam bahasa inggris serta yang telah menguji tesis saya dan meluluskannya dengan nilai sesuai dengan doa dan harapan saya. Terima kasih kepada bpk. Dr. Nur Indriantoro M.Sc. Ak (alm.) dan bpk. Drs. Bambang Kustituantoro, MA (alm.), beliau berdualah orang yang pertama kali menyarankan saya untuk langsung studi lanjut ke program doktor di UGM.

Pada saat itu saya ragu dan bertanya, apa saya bisa? Beliaulah yang meyakinkan dan banyak membantu saya di bidang akademik (akuntansi dan statistik) sehingga saya dapat menyusun disertasi dengan baik. Kepada beliau berdua saya panjatkan doa, semoga amal ibadah beliau diterima Allah SWT dan diberi jalan terang ke surga, amin.

Kepada semua dosen saya di Program Doktor dan Magister UGM, khususnya Drs. Mulyadi M.Sc. yang telah memaksa saya untuk mengubah *mind set* dari paradigma lama ke paradigma baru, menyadarkan saya untuk selalu *to improve my knowledge*, serta Dr. Budiono Sri Handoko, MSc., yang telah merekomendasi saya, sehingga saya mendapat beasiswa unggulan untuk mahasiswa program doktor berusia muda dari University Research For Graduate Education Project. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua dosen saya di Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, khususnya kepada bpk. Prof. Dr. Bambang Subroto, MM, Ak. (dekan FE Unibraw, yang dulu dosen wali saya), bpk. Drs. Mustofa, Ak dan bpk Dr. Ali Djamhuri, MSc., Ak. (beliau berdua pembimbing skripsi saya), serta bpk. Drs. Abidin Lating MM (Pembantu Dekan III) yang telah merekomendasi saya untuk mendapatkan beasiswa Program Peningkatan Akademik dari Dikti Jakarta. Juga kepada Prof. Dr. Iwan Triyuwono, MSc., Ak. (ketua program doktor akuntansi) dan Dr. Unti Ludigdo Msi. (ketua jurusan akuntansi), yang telah melibatkan saya untuk turut mengajar/membimbing/menguji dan menjadi ko promotor disertasi di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua guru saya di Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan SMPP (sekarang SMA 2 Negeri), di Lumajang. Beliau-belieulah yang meletakkan dasar pendidikan dan nilai-nilai etika kepada saya.

Terima kasih kepada bpk. Dr. Hekinus Manao, Ak., MBA., BAP. (Direktur Sistem Informasi Akuntansi, Departemen Keuangan RI) dan ibu Dra. Puspa Rahayu M.Sc., Ak (Direktur Penilaian Kekayaan Negara, Departemen Keuangan RI) yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menjadi konsultan individual di STAR-SDP Asian Development Bank, Departemen Keuangan RI. Proyek tersebut telah mendorong saya untuk mempelajari ilmu akuntansi keuangan yang diimplentasi di Pemerintah RI. Terima kasih juga kepada teman saya dari PLMU STAR-SDP, Asian Development Bank: bpk Berty J. Waworuntu, M.Com., Ak. Dr. (Cand.), beliau banyak membantu sejak tahap awal sampai dengan akhir proyek tersebut. Juga kepada anggota tim saya Dra. Riska Arfianti, MM, Ak., dan Drs. Adam Zakaria, MM., Ak., terima kasih atas bantuan dan kekompakannya dalam menyelesaikan proyek tersebut.

Terima kasih kepada Ketua dan semua Anggota Dewan Pengurus Nasional-IAI Pusat Jakarta, yang telah mengangkat saya menjadi anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan (2002-2006) di Indonesia. Terima kasih juga kepada Ketua DSAK IAI Pusat Jakarta: bpk. Drs. M. Jusuf Wibisono, MSc., Ak. (Partner KAP Haryanto Sahari, Price Waterhousecooper), dan para anggota

DSAK, khususnya kepada: ibu Dr. Etty Retno Wulandari, MBA., Ak. (Kepala Biro SAK Bapepam-LK); bpk. Prof. Dr. Gunadi, MSc., Ak. (Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak); Prof. Dr. Sidharta Utama, Ak., MBA., CFA (Wakil Dekan bid. Akademik FE UI dan Komite Audit: Federal International Finance, Astra Sedaya Finance, Serasi Auto Raya); bpk. Agung Nugroho S., MBA, Ak. (KAP KPMG) dan Drs. Dudi M. Kurniawan, Ak. MBA., BAP (KAP Haryanto Sahari, Price Waterhousecooper). Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada bpk. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM., (KAP Jan Ladiman & Co.), selaku anggota DSAK dan SAP, yang banyak membantu dan memberi masukan dalam rangka menyempurnakan naskah pidato ini. Beliau menjadi tempat saya bertanya tentang banyak hal, khususnya pengetahuan tentang praktik dan standar, atas rekomendasi beliau saya banyak diundang untuk menjadi pembicara di berbagai acara yang diadakan oleh para praktisi dan organisasi profesi IAI di Indonesia. Terima kasih kepada semua kolega di Program Sertifikasi Akuntan Manajemen (CPMA), khususnya kepada bpk. Drs. Ali Darwin MSc., Ak. (Ketua IAI KAM), bpk. Dr. Binsar Simandjuntak (Deputi Ketua BPKP bid. Perekonomian & Pengawasan) dan bpk. Dr. Hendang Ak., MM. (KAP Trisno Hendang Adams & Rekan).

Terima kasih kepada semua kolega saya di Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, khususnya kepada yth. Ibu Kwik Ing Lan dan bpk. Dr. Chandra Setiawan, yang pada saat saya bergabung di IBII beliau adalah ketua yayasan dan rektor, yang sangat perhatian, dan mudah diajak diskusi tentang kemajuan

pendidikan. Juga kepada yth. Bpk. Prof. Dr. Hendrawan Supraktikno; bpk. Prof. Dr. Supriyono, MS., Ak. dan bpk. Dr. Irsan Yani, MSc., Ak. dan semua kolega yang bergabung di Program Pascasarjana IBII. Terima kasih kepada bpk. Ir. Fortuin MM. (Direktur PT Breindo Jaya Teknik) atas kepercayaannya, sebenarnya ketika bapak berkonsultasi dengan saya tentang permasalahan akuntansi manajemen dan manajemen keuangan yang ada di semua perusahaan bapak, justru pada saat itulah saya juga belajar tentang bagaimana mengatasi permasalahan yang ada di praktik (melalui perusahaan bapak). Pengalaman dan pengetahuan tentang praktik bagi saya adalah sangat berarti, sehingga saya dapat bercerita banyak kepada mahasiswa saya tentang aplikasi ilmu akuntansi dan keuangan di perusahaan. Terima kasih juga kepada direktur dan semua rekanan yang bergabung dalam konsultan Mitra Inovasi Baru (MIB Consulting), Jakarta.

Terima kasih kepada suami saya: Prof. Dr. Sutrisno, MSi., Ak., yang dengan tulus dan ikhlas mengizinkan saya bekerja/berkarier di bidang pendidikan. Khusus pada buah hati saya yang tercinta: Heyvon Herdhayinta dan Yurike Mandrasari, yang menjadi harapan dan masa depan saya, terima kasih atas kesabaran, pengertian dan keikhlasannya. Mama minta maaf atas segala keterbatasan mama selama ini, semoga kalian akan menjadi anak yang *kurota a'yun* (anak yang bikin tenang jiwa kita, karena selalu berada di jalan yang benar) dan selalu diberkahi Allah SWT, amin.

Terima kasih kepada almarhum nenek dan kakek saya: H. Noto Mudayin dan Hj. Satidja, serta H. Ponidjan Sasmitomihardjo dan Hj. Siti Masitah, atas doa dan kasih sayangnya, yang saya rasakan ketika saya masih kecil. Beliau telah turut mendidik saya dan banyak mengenalkan saya kepada nilai-nilai keimanan dan keluhuran budi. Kepada almarhum mertua saya, bpk & ibu Kasan Wirdjo, atas doa restunya ketika beliau masih hidup. Kepada almarhum pakde Mohammad BSc. dan bude Emma Peffercorn, yang semasa hidupnya telah memotivasi dan banyak memfasilitasi saya, sehingga saya terinspirasi untuk terus belajar. Semoga arwah nenek/kakek, pakde/bude serta mertua saya diterima dengan tenang disisiNya dan diberi jalan terang ke surga.

Terima kasih juga kepada adik dan kakak saya yang tercinta: Ir. Onwardono Retreantono; Shofie Indri Notari SKg.; Erna Sutari SH. & kel., dr. Ida Maria; dr. Michael Lopian Sp.Bd.; dan Dr. dr. Agus Tuchan, Sp.BS, yang dengan penuh kasih sayang selalu membantu dan memfasilitasi saya ketika saya menunaikan tugas di Jakarta dan Surabaya. Terima kasih kepada semua saudara dan semua famili saya, khususnya kepada kel. Drs. Ir. Bagong Sutrisnadi, MSi., kel. Suprpto, kel. Hermanadi SH. dan kel. Prof. Dr. Sumeru Ashari, MSc., atas doa dan dukungannya selama ini kepada saya. Kepada ibu kos saya ketika kuliah, yaitu: Ibu Nafsiah, Ibu Alfian dan Ibu Hj. Sri Daruni Djoemantoro, terima kasih atas fasilitas yang diberikan kepada saya, serasa di rumah sendiri sehingga saya dapat belajar dengan baik dan meraih gelar sarjana, master dan doktor.

Terima kasih kepada semua sahabat dan teman-teman kuliah saya, khususnya kepada: Dr. Paulus Kindangen MA (Univ. Sam Ratulangi Manado); Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, MEc. (Rektor Ull Yogyakarta), Prof. Dr. Bambang Setiaji MS (Rektor UMS Surakarta), Prof. Dr. Wahyudin MS. (Direktur Program Pascasarjana UMS Surakarta), Prof. Dr. Bambang Sutopo, MCom., Ak. (Dekan FE UNS Surakarta), Dr. Tri Gunarsih MM. (Dekan FE UTY Yogyakarta), Dr. Khomsiyah MM., Ak. (Univ. Trisakti Jakarta), Dra. Dwi Maryani, MSi., Ak. (Ketua STIE YKP Jogjakarta) serta Dr. Regina Jansen MSc., Ak. (Bakrie School of Management).

Terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam kepanitiaan pengukuhan guru besar hari ini. Juga kepada bpk. Drs. Sukarman, bpk. Ari Priyono SH, dan bpk. M. Mastotok Illah S.Kom, yang telah secara teknis membantu mengitung, menyusun dan mengurus semua kepangkatan saya, dari awal hingga akhir ini.

Hadirin yang berbahagia,

Akhirnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kesabarannya mendengarkan pidato ini sampai selesai, serta mohon maaf atas segala kekurangan dan perkataan yang tidak berkenan di hati.

Semoga naskah pidato ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum warokhmatullahi wa barokaatuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfredson, K; K. Leo; R. Picker; P. Pacter; J.Radford; dan V. Wise 2007 *Applying International Financial Reporting Standards*. Australia: John Wiley & Sons.
- Chandrarin, Grahita. 2006. Laporan Penilaian Kurikulum, Material dan Metodologi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah. Laporan Konsultan. Tidak Dipublikasi. State Audit Reform Section Development Program (STAR-SDP), Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta: 1-70.
- DeBerg, Curtis I., H. Fred Mittelstaedt, dan Philip R. Regier. 1987. *Employers' Accounting For Pensions: A theoretical Approach To Financial Accounting Standards No. 87. Journal of Accounting Education*, Vol. 5. hlm. 227-242.
- Financial Accounting Standard Board. *Statement of Financial Accounting Concept: No. 1, 2, 4, 5, & 6.*
- Grady, Paul., 1965, "Accounting Research Study," No. 7: *Inventory of Generally Accepted Accounting Principles for Business Enterprises*, AICPA.
- Hendriksen, Eldon., 1977., "Accounting Theory," Third Edition, USA: Richard D. Irwin, Inc.,
- Holthausen, R., and R. Watts., 2001, "The Relevance of the Value Relevance," *Journal of Accounting & Economics*, Volume 31: 3-75.
- Hoesada, Jan. 2006. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan. Jakarta, Media Akuntansi, Edisi 52/XIII/Januari: 44 46.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 1994, 1999, 2002, 2004 dan 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia dan Persatuan Aktuaris Indonesia. 2006. *Panduan Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24.: Imbalan Kerja*. Jakarta: Salemba Empat.

International Accounting Standards Board. 2004. *International Accounting Standard No. 19: Employee Benefit*. UK, London: IASCF Publication Department.

Kirk, Donald J. 1981 Statements in Quotes. *Journal of Accountancy*, USA.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2006. Memorandum Pembahasan Penerapan Basis AkruaI dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Jakarta, 11 Desember 2006: 1-33.

Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta, 5 April 2003: 1-26.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta, 9 Januari 2004: 1-26.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta, 19 Juli 2004: 1-17.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta, 5 Oktober 2004: 1-25.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta, 15 Oktober 2004: 1-102.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta, 15 Oktober 2004: 1-29.

Pemerintah Republik Indonesia. 2002. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 308/ KMK.012/ 2002 tentang Komite Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta, 13 Juni 2002: 1-4.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta, 13 Juni 2005: 1-6.
- Salomons, David. 1986. The FASB's Conceptual Framework: An Evaluation. *Journal of Accountancy*. USA.
- Sinaga, Jamason dan Wiwik Priyantoro. 2005. Modul Pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: IAI-KASP.
- Scott, W. R.. 2006. Standard Setting: Economic and Political Issues. *Financial Accounting Theory*. Toronto, Ontario : Pearson Education Canada Inc., 382 - 435.
- Swardjono. 2005. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Jogjakarta: BPFE.
- Watts, Ross L., and Jerold L. Zimmerman., 1986, "Positive Accounting Theory," Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, NJ.
- Wolk, H.J.F., M. Tearney dan J.L.Dodd. 2001. A Conceptual and Institutional Approach. *Accounting Theory*. Edisi kelima. Cincinnati, Ohio: South-Western College Publishing.

BIODATA

Nama : Grahita Chandrarin
Tempat dan tgl lahir : Lumajang, 8 Desember 1963
Agama : Islam
Jabatan, Pangkat & Gol. : Lektor Kepala, Pembina & IV-a
Jabatan Struktural : Asisten Direktur I Pascasarjana
Universitas Merdeka Malang
Alamat Kantor : Program Pascasarjana Universitas
Merdeka Malang Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No.57
Malang 65146
Nomor Telp/Fax/E-mail : (0341) 568395-pswt 253/ 582811 /
info@unmer.ac.id
Alamat Rumah : Griyashanta F 206-207 Malang
65142
Nomor Telp/ HP/E-Mail : (0341) 494065 & 475711 /
08123301464 /
grahitac@yahoo.com
Suami : Prof. Dr. Sutrisno, MSi., Ak.
Anak : Heyvon Herdhayinta
Yurike Mandrasari

Riwayat Pendidikan

-
- 2001 : Lulus Doktor di Program Studi Akuntansi Pascasarjana
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
1998 : Selesai mengikuti *Indonesian Ph.D Scholars Program* di
University of Kentucky,U.S.A.
1996 : Lulus Magister Sains di Program Studi Akuntansi
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
1988 : Lulus Sarjana Ekonomi di Program Studi Akuntansi,
Universitas Brawijaya Malang.
1981 : Lulus SMPP (SMAN 2) di Lumajang.
1978 : Lulus SMPN di Lumajang.
1975 : Lulus SDN di Lumajang.
-

Keanggotaan Profesi di tingkat Nasional & Internasional

1. *Member of The Academic Network of Asian Corporate Governance Specialists, OECD (Indonesia Delegation), since 2005.*
2. Anggota Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia, Pusat-Jakarta, Periode 2002-2006.
3. Kompartemen Akuntan Pendidik (KAPd), Ikatan Akuntan Indonesia, Periode 2002-2004 dan 2004-2006, sebagai Koordinator cabang/perwakilan Malang.
4. Anggota Dewan Penguji Sertifikasi Akuntan Manajemen (*Certified Professional Management Accountant-CPMA*), Ikatan Akuntan Indonesia, Pusat-Jakarta, sejak 2006-sekarang.
5. Asesor Pendidikan Profesi Akuntan di Indonesia, sejak 2003-sekarang.

Riset Hibah/Nasional dan Internasioanal

1. International: *The Effect of Reporting of Exchange Rate Losses on the Stock Market Reaction: An Empirical Study from New York Stock Exchange*, joint with Prof. Dr. Michael G. Tearney, University of Kentucky, Lexington, U.S.A. (1998)
2. Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi (Hibah Pekerti), UNMER Malang dan UGM Jogjakarta, selama dua tahun (2003&2004), sebagai ketua Peneliti, yang berjudul "Pengaruh Persistensi Laba Akuntansi terhadap Koefisien Respon Laba Akuntansi: Studi di pasar modal Indonesia."
3. Riset Fundamental, selama dua tahun (2006&2007), sebagai anggota peneliti, yang berjudul "Kajian Peran Auditor sebagai Auditor Ekstern, Auditor Intern, dan Komite Audit dalam membatasi kesempatan Manajemen untuk melakukan Manipulasi Laba dan meningkatkan Kualitas Laba Perusahaan yang dilaporkan kepada Publik."

Penghargaan dan Beasiswa

1. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) untuk mahasiswa berprestasi pada jenjang strata satu dari DIKTI (1983&1984).

2. *Excellent Accounting Research Award at the Second National Accounting Symposium conducted by The Indonesian Institute of Accounting (IAI)- Accounting Educators Compartment* (1999).
3. Beasiswa Unggulan untuk mahasiswa program doktor yang berprestasi dan berusia muda (kurang dari 35 tahun) dari University Research For Graduate Education Project selama 2,5 tahun (1997-1999).
4. Sebagai lulusan Program Doktor dalam Ilmu Ekonomi di Universitas Gadjah Mada dengan predikat *Cum Laude* (2001).
5. Artikel Penelitian Terbaik Kedua dalam Simposium dwi Tahunan "Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi", Yogyakarta, 6 April 2002.
6. Sebagai Dosen Berprestasi dalam Proses Belajar Mengajar (2002).
7. Sebagai Dosen Teladan I Universitas Merdeka Malang (2004).

Riwayat Pekerjaan Sebagai Akademisi

1. Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang, 1990-sekarang.
2. Dosen Tidak Tetap Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2002 sekarang.
3. Dosen Tidak Tetap Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1999- sekarang.
4. Dosen Kontrak Program Pascasarjana Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta, 2003- 2006.
5. Dosen Tidak Tetap Magister Manajemen Agribisnis di Institut Pertanian Bogor, 2004-2005.
6. Dosen Tidak Tetap Program PPAk di Universitas Trisakti Jakarta dan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2007- sekarang.

Pengalaman sebagai Konsultan

1. Individual Consultant on Assessment of the Training Curriculum, Materials, and Methodology were developed by The Government Training and Education Centers - Asian

- Development Bank (State Audit Reform Sector Development Program- STAR SDP), 2006.
2. Associate Partner di Konsultan Mitra Inovasi Baru, Jakarta, 2006-sekarang.
 3. Konsultan Manajemen di PT Breindo Jaya Teknik, Jakarta, 2006.

**Pengalaman sbg. Asesor & Reviewer
Kurikulum/Penelitian/Standar Lab. Ak.**

1. Reviewer Artikel Penelitian di Simposium Nasional Akuntansi ke V (lima) tahun 2002 di Semarang, ke VI (enam) tahun 2003 di Surabaya, dan ke VIII (delapan) tahun 2005 di Solo, dan kesepuluh tahun 2007 di Makasar.
2. Juri Lomba Karya Ilmiah pada Konggres IAI ke X (sepuluh) di Jakarta, 2006.
3. Reviewer Artikel penelitian di Konvensi Nasional Akuntansi di Universitas Trisakti Jakarta, 2006.
4. Asesor Pendidikan Profesi Akuntan di UNS, 2003.
5. Reviewer Standar Minimum Laboratorium Akuntansi Program Sarjana oleh Tim Dikti, 2006.
6. Reviewer DP2M DIKTI, 2007-2008.
7. Reviewer Penelitian Dosen Muda dan Kajian Wanita (DIKTI), 2005-sekarang.
8. Reviewer of "The 8th Asian Academic Accounting Association (AAAA) Annual Conference" Yogyakarta, 2007.
9. Partisipan/pembuat soal Teori dan Akuntansi Keuangan pada Ujian Sertifikasi Akuntan Publik di Indonesia, 2004.

**Training Course/Diklat/Kuliah tamu (sebagai Instruktur/
Pembicara)**

1. Instruktur Diklat PLN di Pandaan-Jatim, Medan, dan Makasar (2002-2003).
2. Pembicara Kuliah tamu di Universitas Airlangga Surabaya (2002), Universitas Sumatera Utara (2003), Universitas Medan Area (2003), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2003), Universitas Muhammadiyah Solo (2002), Institut Bisnis dan Informatika Indonesia dan Universitas Atmajaya Jakarta (2004, 2005&2006), serta STIESIA Surabaya (2006).

3. Instruktur PPL di IAI- Pusat, Jakarta (2003) dan IAI Cabang Jawa Barat (2003&2004).
4. Chairperson of Management Accounting Research di Kolokium Di Prasetya Mulya Jakarta (2004).
5. Pembicara di Kolokium di UNDIP Semarang (2005).
6. Pembicara Akuntansi Sektor Publik di Anggota DPR Kota Kediri (Mei 2007).
7. Pembicara Workshop tentang: (1) Accounting for Liabilities (Maret, 2004); (2) Risk Management Solution (Juli, 2004) yang diselenggarakan oleh IAI-KAM, Jakarta.
8. Pembicara Workshop tentang: (1) Effective Financial Planning (September, 2004); (2) Accounting Standards of Leases-PSAK 30 (Maret, 2004); Standar Akuntansi Ekuitas dan Kuasi reorganisasi-PSAK 21 & 51 (Pebruari, 2004), yang diselenggarakan oleh IAI-Wilayah Jawa Barat, Bandung.

Kunjungan Akademik dan Partisipan Seminar/Simposium Internasional

1. Kunjungan Perpustakaan (*Library Visit*) ke University of Central Florida, Orlando, Florida (1998).
2. Kunjungan Akademik (*Academic Visit*) ke Graduate School of Business, Assumption University, Thailand (2006).
3. Kunjungan Akademik (*Academic Visit*) ke Guanghua School of Management, Peking University, China (2006).
4. Partisipan dalam Seminar Internasional "Global Business Development Trend" Jakarta (Januari, 2004).
5. Partisipan dalam "The 2005 Asian Roundtable on Corporate Governance" dan "The Academic Network of Asian Corporate Governance Specialist Forum" Bali, (September, 2005).
6. Partisipan dalam ASEAN Federation of Accountants (AFA) Roundtable Discussion on Small & Medium Enterprises, Jakarta (Mei, 2006).
7. Partisipan dalam "International Accountant Atandard Boards and Regional Standard Setters Meeting," Jakarta (Juni, 2006).
8. Partisipan dalam "CEO Forum", Jakarta (November, 2006).
9. Partisipan dalam Seminar Internasional "Practical Implementation of Corporate Sustainability/CSR and Reporting" Jakarta, (Pebruari, 2007).

Publikasi Dalam Majalah Ilmiah (5 tahun terakhir)

| No. | Judul Artikel | Tahun | Nama Jurnal/Penerbit |
|-----|---|-------|---|
| 1. | Kandungan Informasi Laba Akuntansi (Earnings) : Studi pada Periode Krisis Moneter di Pasar Modal | 2002 | Jurnal Ekonomi, Fakultas Ekonomi UNMER Malang, Tahun 6, No. 1 Januari 2002, ISSN: 1410-3303 |
| 2 | Firm Size and Earnings Response Coefficients: An Empirical Evidence From Jakarta Stock Exchange | 2002 | The Journal of Accounting, Management, and Economics Research, Vol.2, No.2., ISSN: 1411-8572, Accredited No. 23a/DIKTI/Kep/2004 |
| 3 | The Effect of Transaction Gains (Losses) on the Association between Unexpected Earnings and Abnormal Returns: the Indonesian Case | 2002 | Working Paper |
| 4 | The Impact of Accounting Methods of Transaction Gains (Losses) on the Earning Response Coefficients: The Indonesian Case | 2003 | Jurnal Riset Akuntansi Indonesia |
| 5 | Target Costing: Suatu Kajian Teoritis tentang Alat dan Teknik Implementasi | 2004 | KOMPAK, Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi, Edisi Jan-April, ISSN:0854-6142, Akreditasi:49/DIKTI/Kep/2003 |
| 6 | Arah dan Topik Metodologi Akuntansi Manajemen | 2004 | Jurnal Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta, Vol. 1 No 1, April, ISSN: 1829-6661. |
| 7 | Standar Akuntansi Keuangan (sebagai anggota DSAK) | 2004 | Salemba Empat Jakarta |
| 8 | Pengaruh Persistensi Laba Akuntansi Terhadap Hubungan Laba dan Harga Saham | 2005 | Jurnal Ekonomi, Unmer Malang, Vol.9 No 2, Juni, ISSN: 1693-1726. |

| No. | Judul Artikel | Tahun | Nama Jurnal/Penerbit |
|-----|---|-------|---|
| 9 | Harmonisasi Standar Akuntansi Internasional | 2005 | Makalah disajikan dalam Seminar |
| 10 | Riset Akuntansi Keuangan dan Sains Keperilakuan | 2005 | Jurnal IPS dan Pengajaran Universitas Negeri Malang, Tahun 39 No. 2, Juli, ISSN: 0854-8250. |
| 11 | Kaji Ulang Manajemen Risiko "Triple Bottom Line" | 2005 | Media Akuntansi Edisi Ke 48/Tahun XII, Agustus. |
| 12 | Teknologi Informasi, Sistem Pengukuran Kinerja, dan Penghargaan sebagai Pemoderasi Hubungan antara TQM dengan Kinerja Manajerial. | 2005 | Jurnal Ilmiah Akuntansi, Jakarta, Volume 5 No. 1, September, ISSN: 1412-0240 |
| 13 | Akuntansi Manajemen Kontemporer | 2006 | Jurnal Aplikasi Manajemen, Unibraw Malang, Volume 4 No. 1, April, ISSN: 1693-5241. |
| 14 | Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Struktur Keuangan pada Perusahaan-perusahaan Manufaktur yang Go Public di BEJ | 2006 | Jurnal Ekonomi Unmer Malang, Vol. 10 No. 2, Juni, ISSN:1693-1726. |
| 15 | Buku Panduan Implementasi No.1 PSAK No. 24 (Revisi 2004) Imbalan Kerja (sebagai anggota DSAK). | 2006 | PT Nata Gemilang Jakarta, ISBN: 979/25/3453/9 |
| 16 | Analisis tentang Regulasi yang mendasari Perubahan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia | 2006 | Jurnal Aplikasi Manajemen, Unibra Malang, Vol. 4, No. 2, Agustus, ISSN:1693-5241. |

pengalaman dalam mengelola Jurnal

1. Penyunting Ahli Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang, 2001 sekarang.
2. Penyunting Tamu Jurnal Research Akuntansi Manajemen dan Ekonomi (JRAME) STIE Yo Yogyakarta, 2001 sekarang.
3. Penyunting Tamu Jurnal Ekonomi "Indikator" Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, 2001 sekarang.
4. Dewan Penyunting Jurnal Manajemen akuntansi & Sistem Informasi (MAKSI), Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, 2003- sekarang.
5. Dewan Penyunting Jurnal Akuntansi Manajemen dan Sistem Informasi (KOMPAK) FE Universitas Teknologi Yogyakarta, 2001 - sekarang.
6. Penyunting Ahli Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan (d/h SINERGI) Politeknik Negeri Bali, 2003 - sekarang
7. Dewan Penyunting Ahli Jurnal Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta, 2004 - 2006.
8. Dewan Penyunting Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, Jakarta, 2006 - sekarang.
9. Dewan Pakar (Mitra Bestari), Jurnal Keuangan dan Perbankan, Unmer Malang, 2005-sekarang.
10. *Reviewer*, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, UGM, 2007-sekarang.



- Data
PER
6
REF.